



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Manado.Post

Kanis, 16 Januari 2025

Terungkap Fakta Baru Dugaan Korupsi Perjadin DPRD

BITUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung mengantongi fakta-fakta baru terkait dugaan korupsi belanja perjalanan dinas DPRD Kota Bitung tahun anggaran 2022 dan 2023. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Dr Yadyn SH MH, menjelaskan sudah ada pengakuan dari sejumlah terperiksa mengenai praktik mark-up anggaran perjalanan dinas di berbagai lokasi.

"Ada terperiksa sudah memberikan pengakuan, fakta baru terkait adanya mark-up dalam dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas ini," ujar Kajari Yadyn di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2025).

Hingga saat ini menurutnya, dari 12 orang yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan, 10 telah memenuhi panggilan. "Satu orang sempat hadir tetapi karena sakit kami berikan kesempatan untuk berobat dan akan dijadwalkan pemanggilan kembali. Satu lainnya meminta izin resmi karena ada kegiatan," terangnya.

Kajari memastikan, pemanggilan terhadap sejumlah pihak lainnya masih akan dilakukan untuk mendalami keterlibatan mereka dalam kasus ini.

"Semua pihak yang relevan akan diperiksa kembali tanpa pengecualian. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini dengan profesional dan transparan. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, kami akan mengambil langkah tegas sesuai peraturan yang berlaku," tambahnya. Dijelaskannya, terkait dengan progres penanganan kasus dugaan korupsi ini, selain melakukan pemanggilan kembali kepada para legislator untuk memperdalam peristiwa, Kejari Bitung sudah melakukan ekspose perkara di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Nanti lembaga resmi ini yang menghitung kerugian negara. Jika sudah rampung, setelah itu baru ada penetapan tersangka." tutup Kajari. (tr-01)

TERUS DIDALAMI: Kejaksaan Negeri Bitung mendapatkan fakta baru terkait dugaan korupsi perjadin DPRD.